



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU HIDAYAT
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 504388

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.260.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/125 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
2. Tanah Seluas 1097 m² di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 90.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 283 m²/230 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 635.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC HATCHBACK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 832.465.179**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.777.465.179

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.777.465.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.